PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2020 | Hal.: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Keterbatasan Anggaran

KETERBATASAN anggaran menjadi problem utama, sehingga kualitas kegiatan pemeliharaan jalan menjadi kurang baik. Untuk itu, dengan kebijakan baru Gubernur Kalbar yang tidak akan menswakelolakan kegiatan pemiliharaan diharapkannya mampu meningkatan kualitas kegiatan pemeliharaan jalan, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Masdar

"Kebijkan Pak Gubernur untuk pemeliharaan jalan ini tidak ada lagi swakelola, artinya melalui proses lelang. *Nah*, kita harapkan dari pihak pelaksana bisa benar-benar bertanggung jawab. Selain itu juga tindakan yang bisa diambil terhadap pelaksana jika pekerjaan kurang baik bisa lebih tegas lagi," kata anggota DPRD Provinsi Kalbar Masdar, saat bertandang ke Sukadana, kemarin.

Kader dari Partai Demokrat ini menambakan, faktor lain juga disebabkan keterbatasan anggaran, sehingga menyebabkan kualitas pemeliharaan jalan kurang baik kualitasnya. "Karena kita lihat, pemeliharaan selama ini, hasilnya kurang maksimal. Tentu kita tidak menyalahkan pekerjaan kontraktor, mungkin karena keterbatasan anggaran. Makanya kita tidak bisa berharap kualitas jalan itu bagus. Jika tidak didukung dengan anggaran yang memadai, itu juga salah satu jawaban untuk pertanyaan kenapa hasil dari pekerjaan pemeliharaan selalu mengecewakan," jelasnya.

Sebagai legislator daerah pemilihan Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, dia pun akan memperjuangkan anggaran untuk Kabupaten Kayong Utara ke depannya bisa lebih besar lagi. Mengingat daerah ini, diakui dia, masih banyak infrastruktur dasar yang belum memadai.

"Kalau kita berbicara cukup, tentu ini tidak cukup, karena (wilayah) Pemprov (Kalbar) bukan hanya Kayong Utara saja yang harus diperhatikan, tapi ke depannya, kita kawal *lah* untuk peningkatan anggaran. Kebetulan saya di Badan Anggaran (DPRD Provinsi Kalbar), nanti kita komunikasikanlah dengan Dinas PUPR Provinsi supaya ada tambahan," pungkasnya. ***(dan)***